

ARSITEKTUR JENGI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN TERHADAP ARSITEKTUR KOLONIAL PADA ABAD XX

Zalfa Salsabil Dalilah Cameleon

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: zalfasalsabil.20067@mhs.unesa.ac.id

Sumarno

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: sumarno@unesa.ac.id

Abstrak

Kondisi sosial dan politik yang terjadi pada tahun 1950-1960 turut mempengaruhi terbentuknya karakter sosial budaya dan kekayaan arsitektur bangunan sebagai bagian dari denyut nadi Kota Surabaya. Eksistensi arsitektur jengki tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik karena dalam perkembangan gaya ini terdapat semangat nasionalisme para arsitek yang ingin menghilangkan sisa kolonialisme di Indonesia pasca kemerdekaan. Semangat anti-kolonialisme ini dituangkan para arsitek ke dalam bentuk arsitektur khas Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama arsitektur jengki. Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana kondisi sosial dan politik Surabaya pada Abad XX? (2) Mengapa arsitektur jengki menjadi bentuk penolakan terhadap arsitektur kolonial? (3) Bagaimana tipologi bentuk bangunan arsitektur jengki yang ada di Kota Surabaya? Metode Penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rentang tahun 1950-1960 kondisi sosial-politik di Surabaya masih belum stabil pasca kolonialisme Hindia-Belanda sehingga turut mempengaruhi proses pembangunan di Surabaya. Adanya fenomena tersebut berpengaruh terhadap bentuk dan ciri arsitektur bangunan, sehingga lahir arsitektur jengki asli Indonesia sebagai bentuk penolakan terhadap arsitektur kolonial dan tercipta atas keinginan arsitek dalam mencari jati diri serta kebebasan ekspresi atas kolonialisme. Pada kajian tipologi fasad arsitektur jengki di Surabaya ditemukan kesamaan pada warna, atap, jendela, roster, dan ornamen dinding bangunan.

Kata Kunci : Arsitektur Jengki, Sosial-politik Kota Surabaya pada abad XX, Tipologi fasad

Abstract (Italic)

The social and political conditions that occurred in 1950-1960 also influenced the formation of socio-cultural characters and the richness of building architecture as part of the pulse of the city of Surabaya. The existence of jengki (yankee) architecture cannot be separated from political influences because in the development of this style, there was a spirit of nationalism of architects who wanted to eliminate the remnants of colonialism in Indonesia after independence. This anti-colonial spirit was poured by architects into a form of typical Indonesian architecture which was later known as jengki (yankee) architecture. The formulation of the problem taken in this study is (1) How were the social and political conditions of Surabaya in the 20th century? (2) Why did jengki (yankee) architecture become a form of rejection of colonial architecture? (3) What is the typology of the form of jengki (yankee) architectural buildings in the city of Surabaya?. The research method used by the researcher is the historical method consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of the study show that in the period of 1950-1960, the socio-political conditions in Surabaya were still unstable because of colonialism so that they also influenced the process of urban development. The existence of this social phenomenon influenced the form and characteristics of the building architecture so that the original Indonesian jengki (yankee) architecture was born which was very different from colonial architecture and was created based on the architect's desire to find identity and freedom of expression after colonialism. In the study of the typology of the facade of jengki (yankee) architecture in Surabaya, similarities were found in the color, roof, window, roster, and wall ornament of the building.

Keywords: Jengki Architecture, Socio-politics of Surabaya in 20th century, Façade typology

PENDAHULUAN

Dari sekian banyak wilayah di Indonesia, Surabaya termasuk sebagai kota besar yang berhasil mengalami pertumbuhan dari segi ekonomi maupun infrastruktur kotanya. Pada periode tahun 1801-1900 hingga awal tahun 1901-an, Surabaya berstatus sebagai kota paling besar di antara kota-kota yang lain karena berhasil menjadi pusat ekonomi akibat lokasinya yang strategis serta memiliki pelabuhan yang menjadi daya tarik terhadap datangnya para pedagang dari mancanegara, beberapa di antaranya Arab, Persia, Turki, India, dan Cina yang bertujuan untuk berdagang maupun singgah di kota ini. Sedangkan pada era kolonial, Kota Surabaya berhasil menjadi kota penghasil komoditas ekspor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa Indonesia, serta tumbuh menjadi daerah industri dan perdagangan.¹

Penyebutan kota besar bagi Surabaya dilandasi UU No. 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan peraturan sebagai berikut: Daerah-daerah yang meliputi Kota Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, Cirebon, Yogyakarta, dan Surakarta ditetapkan menjadi kota besar (Pasal 1 UU.No.16/1950). Pemerintahan Daerah Kota Besar ditempatkan di Kota Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, Cirebon, Yogyakarta, dan Surakarta (Pasal 2). Dengan disahkannya Undang-Undang ini maka ketentuan dari UU Pembentukan Kota Surabaya (Staatblads.1928/No.504) secara yuridis resmi dicabut dan UU terbaru mulai diberlakukan pada tanggal 15 Agustus 1950.²

Selama penjajahan bangsa asing yang berlangsung bertahun-tahun, Indonesia mengalami banyak kerugian karena perang melawan penjajah tersebut, akibatnya anggaran pemerintah Indonesia mengalami kemerosotan sebesar 1,6T rupiah pada tahun 1948 dan 1,5T rupiah pada tahun 1949.³ Karena keadaan yang defisit dan terjadi inflasi itu perekonomian Indonesia menjadi sangat lemah, hingga berakibat pada menurunnya perekonomian di kota-kota besar, termasuk daerah pusat perekonomian seperti kota Surabaya. Tidak hanya berpengaruh pada merosotnya sektor ekonomi, penjajahan bangsa asing terutama Belanda kepada Indonesia juga mempengaruhi keadaan sosial politik penduduk. Penjajahan tersebut menimbulkan rasa tidak suka terhadap Belanda di kalangan masyarakat.⁴ Terlebih pada tahun 1946, Belanda kembali menduduki Kota Surabaya.

Masyarakat menuntut agar Belanda tidak lagi ikut campur dalam kepentingan politik maupun ekonomi di Indonesia, dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan untuk menghentikan kepentingan Belanda di dalam negeri.

Rasa tidak suka terhadap Belanda juga menumbuhkan jiwa nasionalisme di kalangan arsitek-arsitek Indonesia dalam bentuk pemberontakan idealisme para arsitek lokal masa itu terhadap neo-kolonialisme dan kapitalisme. Pemberontakan idealisme para arsitek mulai mencuat saat berakhirnya masa penjajahan dan munculnya agresi militer tentara Belanda yang menyebabkan krisis gaya arsitektur di Indonesia. Krisis gaya arsitektur khas Indonesia ini terjadi karena adanya pengaruh gaya arsitektur modern Belanda (indis) yang banyak berdirinya megah di Nusantara. Banyaknya langgam arsitektur modern Belanda yang ada di Indonesia menunjukkan kejayaan kolonialisme dan kapitalisme bangsa asing, di mana hal tersebut berakibat pada lahirnya semangat anti-kolonialisme dan anti-kapitalisme di antara para arsitek dengan menunjukkan perlawanan/pemberontakan terhadap gaya arsitektur barat yang dirasa sebagai gaya kolonialisme/gaya bangsa penjajah. Salah satu bentuk pemberontakan itu menghasilkan karya arsitektur bangunan yang dinamakan arsitektur jengki. Arsitektur jengki ini juga lahir dari hasil semangat *volkgeist* (semangat komunitas) sebagai bentuk penolakan masyarakat atas gaya kolonialisme.

Awal kemunculan arsitektur jengki terletak di sebuah perumahan yang diperuntukkan penduduk *middle class* di Kebayoran Baru, Jakarta. Pembangunan perumahan ini menjadi jejak awal keberadaan arsitektur jengki yang kemudian semakin menjamur di daerah lain seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Gaya arsitektur ini tidak banyak diterapkan pada bangunan umum dan paling banyak digunakan di bangunan tempat tinggal, karena keadaan pasca kemerdekaan Indonesia masih belum mampu untuk memulihkan perekonomian dan pemerintah tidak memiliki banyak dana untuk membangun sebuah bangunan, sehingga munculah pendekatan desain hemat konstruksi yang tetap berusaha mencari bentuk bercirikan Indonesia. Di Kota Surabaya sendiri, sekitar tahun 1950-an mulai dilakukan pembangunan yang meliputi perkampungan dan pemukiman penduduk sebagai bentuk rekonstruksi atas rumah tinggal rusak maupun hancur karena peperangan. Urgensi perbaikan kampung-kampung atau pemukiman di Surabaya tahun 1953 dilakukan secara berjenjang atau secara perbaikan timbul sulam dengan target utama infrastruktur umum di sekitar kampung. Dengan adanya proyek daerah otonom Surabaya ini, serta gejolak politik tahun 1950-1960an yang ditandai dengan berpulangnya arsitek Belanda ke negerinya dan disertai munculnya ahli bangunan lulusan pertama arsitek Indonesia, menjadi sebuah dasar yang membentuk perkembangan rumah bergaya jengki di Surabaya.

Keterkaitan antara fenomena rumah jengki yang

¹ Nasution, *Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial 1830-1930* (Surabaya: Pustaka Intelektual, 2006), hlm. 125.

² Rintoko, Rafiandeta, dan Exocet, *Seri Sejarah Soerabaja: Studi Dokumentasi Perkembangan Teritorial Surabaya, 1850-1960* (Jakarta: Unesa University Press, 2010), hlm. 185-186.

³ Jan Luiten van Zanden Daan Marks, *Ekonomi Indonesia 1800-2010 Antara Drama Dan Keajaiban Pertumbuhan* (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hlm. 280.

⁴ Yahya A. Muhaimin, *Bisnis Dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 22-23.

disebut sebagai karya arsitektur asli Indonesia dan eksistensinya sebagai bentuk penolakan terhadap arsitektur kolonial sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam menggunakan kajian sejarah. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis mengapa eksistensi arsitektur jengki dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap arsitektur kolonial pada abad XX.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan penelitian ini akan dijabarkan mengenai arsitektur jengki sebagai bentuk penolakan terhadap arsitektur kolonial pada abad XX dengan menggunakan metode sejarah yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tahapan pertama adalah heuristik, peneliti mengumpulkan sumber sejarah primen maupun sekunder yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti untuk menunjang proses penelitian. Metode yang diterapkan yaitu studi kepustakaan dengan meneliti dan mengkaji buku, surat kabar sezaman, majalah, artikel, arsip, maupun catatan lain yang terkait dengan topik penelitian. Sumber primer yang didapat peneliti berupa dokumen sketsa bangunan arsitektur jengki yang didapat dari departemen arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember, surat kabar *Harian Suara Merdeka 2004*, *Harian Kompas 2002*, serta *Tabloid Rumah 2004 Edisi 40*. Kemudian sumber sekunder berupa buku antara lain *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya, 1870-1940*, *Seri Sejarah Soerabaja: Studi Dokumentasi Perkembangan Teritorial Surabaya 1850-1960*, *Surabaya City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000*, *Retronesia: The Years Of Building Dangerously*.

Tahapan kedua adalah kritik (verifikasi/uji sumber), peneliti melakukan verifikasi untuk menguji keabsahan sumber yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan kritik internal yang dilakukan untuk menguji kredibilitas isi sumber baik berita massa sezaman, jurnal penelitian, dan buku-buku untuk mempertimbangkan informasi yang ada pada sumber tersebut, sehingga dapat diperoleh sumber yang kredibel dan berisi fakta sebagai acuan penelitian.

Tahapan ketiga yaitu interpretasi (analisis fakta). Sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dan telah melalui tahap kritik selanjutnya diinterpretasikan agar menjadi fakta yang berkesinambungan. Fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu (1) Surabaya ditetapkan sebagai kota besar sesuai dengan *Staatblads 1928/No.504*. Fakta ini didapat dari buku *Seri Sejarah Soerabaja: Studi Dokumentasi Perkembangan Teritorial Surabaya 1850-1960*. (2) kehidupan sosial, ekonomi, politik di Surabaya pada tahun 1950-1960 tidak terlalu baik di mana kehidupan sosial ekonominya terdapat banyak pemukiman kumuh karena kurangnya keuangan pemerintah dalam pembangunan rumah di Kota Surabaya. Fakta ini didapat dari buku *Surabaya City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000* dan jurnal penelitian *Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Surabaya Tahun 1950-1966*. Fakta-fakta

tersebut dihubungkan menjadi sebuah rekonstruksi sejarah yang dianalisis menggunakan ilmu bantu konsep arsitektur.

Tahapan keempat yaitu historiografi (penulisan hasil penelitian), peneliti menyusun hasil penelitian secara logis, sistematis, dan kronologis berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika dilihat dalam kacamata kajian kebudayaan, berbagai bentuk dan ciri arsitektur bangunan yang ada pada tempat dan masa tertentu merupakan pengaruh dari adanya fenomena sosial, ekonomi, politik, keagamaan, dan iklim di lingkungan tersebut. Sistem sosial dan kebudayaan yang ada di masyarakat serta adanya teknologi juga menambah entitas pengaruh terhadap wujud-wujud arsitektur di setiap wilayah. Dengan demikian maka segala fenomena sosial-politik yang terjadi di Surabaya pada abad XX tentunya bersinggungan dengan terciptanya bentuk arsitektur jengki. Berikut ini akan dipaparkan mengenai kondisi sosial politik dan pembangunan di Surabaya pada masa kolonial sebagai landasan terciptanya arsitektur jengki hingga kondisi sosial politik pasca kolonial pada tahun 1950-1960 serta perkembangan arsitektur pada abad XX.

A. Kondisi Sosial Politik Surabaya pada Masa Kolonial

Berdirinya Gemeente Surabaya didasari oleh UU desentralisasi pada tahun 1903 (*Decentralisatie Wet 1903*). Kemudian pada 1 April 1906 pemerintahan Kota Surabaya secara resmi menjadi kota otonom bernama Gemeente Surabaya yang disahkan melalui *Staatsblad No. 149 Tahun 1906*. Dalam hal ini, maka Surabaya ditetapkan sebagai kota otonom atau kota mandiri yang memiliki kewajiban dalam mengelola kota secara mandiri.

Dalam periode tahun 1906 hingga 1942, Gemeente Surabaya dipimpin oleh 5 *burgemeester* atau walikota yaitu Mr. A. Meyroos (1916-1921), Ir. G.J. Dijkerman (1921-1929), H.I. Bussemaker dan G.J. ter Poorten (1929-1932), Mr. W.H. van Helsdingen (1932-1935), dan Mr. W.A.H. Fuchter (1935-1942). Dalam kepemimpinan 5 *burgemeester* tersebut Gemeente Surabaya mengalami beberapa perkembangan dari segi kondisi sosial dan politiknya. Dari segi sosial, Gemeente Surabaya terbagi ke dalam beberapa wilayah administrasi yang kedudukannya berada di bawah pemerintahan Gemeente yang dinamakan *wijk* (lingkungan) dan dipimpin oleh *Wijkhoofd* atau *Wijkmeester*. Pada awal berdirinya Gemeente Surabaya, terdapat 25 *wijk*, hingga pada tahun 1914 mengalami penambahan jumlah menjadi 26 *wijk* atas dasar Keputusan Residen Surabaya No. 2/24 tanggal 24 April 1914.

Jabatan *burgemeester* pertama kali dipegang oleh Mr. A. Meyroos pada 1916-1921. Pada periode ini, Gemeente Surabaya sudah mengambil alih semua tanggung jawab pemerintah pusat seperti pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja gemeente dengan cara

memaksimalkan peran perusahaan pemotongan hewan (*abattoir*), perusahaan air minum, dan pasar. Gemeente juga mulai menarik pajak kepada warga kota untuk menambah kas. Burgemeester selanjutnya yaitu Ir. G.J. Dijkerman pada 1921-1929 yang membawa perubahan besar bagi Surabaya yakni terjadi peningkatan status Pemerintah Kota Surabaya dari *gemeente* menjadi *stadsgemeente* di tahun 1926. Hal ini dilandasi oleh keluarnya *Stadsgemeente Ordonnantie* pada tanggal 10 Oktober 1926, yang dimuat dalam Staatsblad No. 365 tahun 1926. *Ordonnantie* tersebut berisi mengenai ketentuan peningkatan status *gemeente* (otonomi terbatas) menjadi *stadsgemeente* (otonomi penuh), sehingga *stadsgemeente* disebut *zelfstandige recht-gemeenschappen*, yang merupakan sebuah wewenang penuh dalam pengelolaan kota (otonomi penuh), dan memiliki hak untuk membuat berbagai peraturan (perangkat hukum untuk mengatur kota).

Pada tahun 1929-1930, jabatan burgemeester dipegang oleh H.I. Bussemaker dan pada 1930-1932 dilanjutkan oleh G.J. ter Poorten. Pada periode ini Gemeente Surabaya ditangani oleh dua lembaga yaitu *burgemeester* dan *wethouders*. Pada saat kepemimpinan Burgemeester Mr. W.H. van Helsdingen (1932-1935) terdapat perubahan yang cukup signifikan pada sistem pemerintahan di mana terjadi penambahan anggota *gemeenteraad* yang semula 27 orang menjadi 31 orang pada tahun 1932.

Kemudian jabatan terakhir *burgemeester* sebelum digantikan oleh pemerintahan Jepang dipegang oleh Mr. W.A.H. Fuchter dengan periode jabatan 1935-1942. Pada masa pemerintahannya, Kota Surabaya berhasil menjadi pusat dagang dan industri serta mengalami peningkatan jumlah penduduk yang semula pada awal berdirinya Gemeente Surabaya hanya sebanyak 150.000 orang, meningkat menjadi 377.096 orang pada tahun 1936. Selain itu, Mr. W.A.H. Fuchter juga berhasil membuat program perbaikan kampung (*kampongverbetering*) yang biayanya ditanggung oleh *gemeente* (beberapa disubsidi oleh pemerintah pusat) dengan tujuan utama membenahi saluran air (*riool*) dan memperbaiki rumah penduduk yang sangat tidak layak. Hingga dalam jangka waktu satu tahun, program *kampongverbetering* berhasil memperbaiki kampung seluas 408,63Ha dengan total biaya F 1.060.000.⁵

B. Pembangunan di Surabaya pada Masa Kolonial

Pembangunan di Surabaya pada masa kolonial berfokus pada gedung-gedung baru serta sarana dan prasarana untuk menunjang roda pemerintahan. Salah satunya yaitu pembangunan kantor Gemeente Surabaya yang dirancang oleh arsitek Belanda ternama G.C. Citroen pada tahun 1920. Kantor Gemeente dibangun di

daerah Ketabang yang pada saat itu lokasinya masih sepi dan terdapat tanah kosong yang luas. Balaikota Surabaya berdiri megah dengan tampilan arsitektur kolonial modern yang sedang menjadi tren di Eropa kala itu. Memiliki panjang sekitar 102m, mengarah ke selatan dengan disertai halaman dan rerumputan yang sangat luas.

Selain pembangunan gedung-gedung pemerintahan, Gemeente Surabaya juga memberikan perhatian terhadap fasilitas umum contohnya, pembangunan dan peningkatan jalan raya. Jalan raya seluas 43.000m² berhasil diaspal setiap tahunnya dengan anggaran sebesar F 250.000. Selain itu, Burgemeester Dijkerman juga berhasil membangun 2 jembatan dalam kurun waktu 2 tahun yaitu pada tahun 1924 dibangun jembatan Gubeng dengan biaya F 266.338, kemudian tahun 1925 dibangun jembatan Wonokromo yang menghabiskan biaya sebesar F 200.000. Selain itu pada tahun 1927 juga ada program perbaikan drainase sebagai tindakan preventif pencegahan banjir karena letak geografis Surabaya yang sering terkena rendaman air dalam jangka yang cukup lama. Proyek drainase pertama yang dikerjakan adalah pembangunan saluran bawah tanah (*riool*) di Jalan Embong Malang yang menghabiskan anggaran sebanyak F 154.000 serta pengerukan saluran air di Krembangan dengan biaya sebesar F 200.000. Program tersebut tuntas pada tahun 1928.

Pembangunan perumahan bagi warga pribumi maupun orang Eropa juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Perumahan untuk orang-orang Eropa direncanakan dibangun di daerah T (yang dibatasi oleh Simpang, Kaliasin, Lemah Putro, dan Kayoon) kemudian meluas ke kawasan Gubeng dengan membeli tanah-tanah di daerah tersebut seharga 145.000 gulden pada periode 1906-1916 hingga daerah Gubeng menjadi kawasan perumahan elite di Surabaya. Perumahan orang Eropa semakin diperluas hingga ke Jl. Tidar, Pacar Keling, Jl. Diponegoro, Jl. Raya Darmo hingga pada saat itu kawasan Darmo juga menjadi terkenal sebagai kawasan perumahan bergensi di Surabaya.

Pihak Gemeente Surabaya juga membuat program pembangunan perumahan untuk rakyat kelas menengah dan berpenghasilan rendah. Gemeente mendirikan perusahaan bernama *NV. Volkhuysvesting* untuk menunjang pembangunan perumahan rakyat. Perusahaan ini berhasil membangun perumahan rakyat di Undaan I dan II, Sidodadi I dan II, serta daerah sekitar *Viaductstraat* (sekarang Dharmahusada) namun mengalami kebangkrutan pada tahun 1930 karena pengelolaan dan keuangan yang buruk.

C. Kondisi Sosial Politik Surabaya pada Tahun 1950-1960

Perkembangan arsitektur jengki dimulai pada tahun 1950, hingga mengalami penurunan pada tahun 1960

⁵ R. Heida, 'De Kampongverbetering Te Soerabaja,' dalam *Locale Techniek* No.2 (Soerabaja-Nummer), Maart-April, 1939, hlm. 49.

karena mulai munculnya desain-desain arsitektur baru yang masuk ke Indonesia. Dalam perkembangannya, arsitektur ini tidak lepas dari gejolak sosial dan politik yang memanas kala itu. Adanya permasalahan sosial dan ketegangan politik di tengah masyarakat turut mewarnai perkembangan arsitektur di Indonesia. Pada tahun 1950 bangsa Indonesia berada di masa revolusi atau orde lama yang terhitung sejak tahun 1945 hingga tahun 1966. Pada dasarnya, lini masa tahun 1950-1960 terbagi ke dalam dua masa pemerintahan yaitu pemberlakuan sistem demokrasi liberal pada 1950-1959, dan sistem demokrasi terpimpin pada 1959-1966. Pada penghujung tahun 1949 hingga permulaan tahun 1950, Indonesia sejatinya masih berada dalam masa transisi yang signifikan pasca proklamasi kemerdekaan karena meskipun telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Belanda baru secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dimediasi oleh PBB. Dengan adanya hasil putusan KMB juga secara resmi menandai berakhirnya masa kolonial Belanda di Indonesia dan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menjadikan Indonesia sebagai negara federal.

Di kota Surabaya pada rentang waktu 1950-1960 tidak jauh berbeda dengan keadaan politik nasional pada saat itu. Pada awal tahun 1950 masih terjadi gejolak penolakan Negara Jawa Timur yang diciptakan oleh Belanda. Di Surabaya sendiri, pembubaran Negara Jawa Timur diprakarsai oleh Indra Koesoema yang juga sempat diangkat menjadi Walikota Surabaya.⁶ Dalam rentang waktu 1950-1960 ini, Kota Surabaya dipimpin oleh empat pemimpin yaitu Walikota Doel Arnowo (tahun 1950-1952), Walikota R. Moestadjab Soemowidigdo (tahun 1952-1956), Walikota R. Istidjab Tjokroesoemo (tahun 1956-1958) dan Walikota Dr. Satrio (tahun 1958-1963).

Pada rentang tahun 1950-1960 dan kepemimpinan 4 walikota tersebut, Kota Surabaya masih berada di kondisi sosial yang kurang stabil. Berbagai masalah sosial timbul di segala aspek kehidupan masyarakat Kota Surabaya mulai dari kompleksitas etnis dan terbentuknya berbagai pandangan terhadap golongan penduduk etnis tertentu, hingga ketimpangan antara banyaknya jumlah penduduk dengan ketersediaan tempat tinggal. Pesatnya arus urbanisasi berdampak pada timbulnya struktur kependudukan multietnis di Kota Surabaya yang terbagi atas masyarakat pribumi (orang-orang keturunan Jawa, Madura, Ambon) dan non pribumi (Cina/Tionghoa, Arab, Eropa, India, Pakistan). Terdapat peningkatan yang signifikan atas pertumbuhan jumlah penduduk non pribumi setiap tahunnya, data tersebut berhasil dicatat oleh surat kabar Trompet Masyarakat sebagai berikut

Tabel 1 Pertumbuhan penduduk pribumi dan non pribumi di Kota Surabaya Pada tahun 1950-1953

Tahun	Pribumi	Tionghoa	Eropa	Arab	India	Lain-lain	Jumlah
1950	568.877	102.363	33.808	7.419	192	469	713.128
1951	703.477	109.551	32.392	7.811	2.125	533	855.889
1952	766.169	112.246	31.589	8.011	2.169	678	920.862
1953	771.378	112.114	31.377	7.893	2.178	679	925.619

Sumber: 'Penduduk terus Mengalir ke Kota Surabaya', *Trompet Masyarakat*, 1 April 1953.

Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah penduduk Surabaya meningkat sebanyak 200.000 orang lebih sehingga berbagai fenomena sosial yang terjadi di dalam kota turut mengalami peningkatan terutama permasalahan mengenai tempat tinggal yang semakin sulit didapat.

D. Pembangunan di Surabaya pada Tahun 1950-1960

Pembangunan perumahan terus dilakukan selepas kepergian Belanda di Indonesia. Pembangunan di Kota Surabaya juga tidak lepas dari adanya program pemerintah pusat terkait perumahan. Selain untuk para angkatan perang dan pegawai pemerintahan, pembangunan perumahan awalnya juga direncanakan untuk ditinggali para pekerja dari ibukota. Hal tersebut didasari oleh adanya undang-undang pembentukan kota yang dirancang pada akhir pemerintahan Hindia Belanda bernama *Stadsvorming Ordonnantie* (SVO) pada tahun 1948 dan *Stadsvorming Stadsvorming* (SVV) pada tahun 1949. UU tersebut menjadi landasan pembangunan perumahan pertama di Indonesia yang letaknya di daerah Kebayoran, Jakarta. Pembentukan kota di daerah Kebayoran ini kemudian dinamakan sebagai "Kebayoran Baru" dengan luas wilayah 720 hektar, yang merupakan perkampungan penduduk dan terdapat kebun buah serta lahan persawahan. Kota serta perumahan di Kebayoran Baru dirancang pada tahun 1948 oleh arsitek lokal Moh Soesilo dan diharapkan dapat ditinggali kurang lebih 100.000 jiwa. Bentuk-bentuk rumah di Kebayoran Baru ini juga menjadi pelopor arsitektur jengki di Indonesia karena bentuknya yang unik dan tidak lagi menggunakan ciri arsitektur Eropa.

Pada kepemimpinan presiden Soekarno, permasalahan terkait perumahan mulai diperhatikan kembali. Di tahun 1950, diadakan kongres perumahan sehat yang menghasilkan tiga gagasan yaitu:

1. Pembentukan perusahaan perumahan di setiap provinsi. Pemerintah membentuk Djawatan Perumahan Rakjat yang merupakan bagian dari Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1952. Tugas dari divisi ini yaitu meningkatkan peran pemerintah sebagai pihak penyedia perumahan untuk rakyat.
2. Pembentukan lembaga pembiayaan dan pembangunan perumahan rakyat. Pemerintah

⁶ Purnawan Basundoro, *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi (1906-2012)* (Yogyakarta: Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan Elmantara Publishing, 2012), hlm. 49.

membentuk Yayasan Kas Pembangunan (YKP) untuk mempermudah pembangunan perumahan yang harganya terjangkau untuk disewa ataupun diperjualbelikan kepada para anggota penabungnya. YKP tercatat sukses membangun 12.460 unit di seluruh Indonesia dalam jangka waktu 1951-1962. Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan (LPMB) juga dibentuk pada 1953 sebagai pihak yang berfokus pada pencarian penyelesaian permasalahan pengembangan rumah murah, menyiapkan rancangan dasar rumah sehat, kokoh, dan memenuhi standar.

3. Merumuskan syarat-syarat teknis yang berhubungan dengan standar minimal untuk rumah rakyat yang meliputi luas bangunan minimal 53, 5 m dan ketinggian tinggi plafon minimal 2, 75 m. adanya persyaratan ini adalah untuk menekan biaya pembangunan rumah karena kebanyakan rumah pada era kolonial Belanda berukuran cukup besar.

Berdasarkan hasil kongres tersebut, pada tahun 1952 Kota Surabaya mulai gencar melakukan pembangunan perumahan untuk warga yang rumahnya rusak saat penjajahan. Target lokasi pembangunan yaitu di wilayah Darma Rakyat, Kapas Krampung, Putro agung, dan Karang Empat. Lalu lokasi lainnya diperuntukkan bagi anggota militer angkatan darat di Gunung Sari, angkatan laut di Tanjung Perak, pegawai kereta api di Sidotopo, serta pegawai perkebunan negara di Joyoboyo. Pembangunan ini dikelola oleh YKP-KMS (Yayasan Kas Pembangunan-Kotamadya Surabaya) pada tahun 1954.

pembangunan perumahan rakyat yang harganya terjangkau dan sesuai dengan arahan presiden ini tercantum dalam *masterplan* yang merencanakan pembangunan di daerah *sub centres* di Surabaya bagian barat sebagai daerah industri baru dan perumahan, Kecamatan Karangpilang sebagai daerah perumahan dan rekreasi, Kecamatan Wonocolo sebagai daerah perumahan, Kecamatan Sukolilo sebagai daerah rekreasi dan perumahan.⁷

Sedangkan di tahun 1960-an, fokus pemerintah kota ada pada proyek pembangunan kota. Perbaikan jalan yang kondisinya tidak baik karena mengalami kerusakan dan berlubang menjadi prioritas utama pemerintah, diikuti dengan pembangunan bangunan rumah-rumah baru beserta infrastruktur pendukung lain, serta perluasan wilayah kota yang termasuk dalam program berkelanjutan pemerintah kota dalam perencanaan pembangunan tata kota Surabaya. Selain pembangunan jalan, beberapa program Pemerintah Kota Besar Surabaya dalam pembangunan kota di antara lain yaitu membangun dan memperluas taman kota yang tersebar di beberapa titik, membangun saluran-saluran air dan sumur resapan air, membangun toilet umum, memperbanyak jumlah penerangan jalan, dan menambah

aliran listrik ke rumah-rumah penduduk. Dijalankannya program-program tersebut juga sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memperbaiki tatanan kota Kota Surabaya yang dipenuhi pemukiman liar yang mulai menjamur di tahun 1950-1960.

E. Perkembangan Arsitektur Kolonial di Surabaya pada Masa Kolonial

Perkembangan arsitektur di Indonesia bermula ketika kedatangan Bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, terutama Belanda. Banyaknya bangunan kolonial di Kota Surabaya juga menjadi penanda identitas penguasa di wilayah tersebut dan sebagai pembeda antara penduduk Belanda dengan rakyat pribumi. Bangunan dengan arsitektur kolonial dapat dijumpai pada bangunan-bangunan kantor pemerintahan, bangunan umum, maupun bangunan tempat tinggal orang-orang Belanda. Bangunan-bangunan tersebut umumnya terletak di wilayah strategis Kota Surabaya, mengikuti pola hunian golongan orang-orang Eropa yang tinggal secara berkelompok. Karena hal inilah, banyak terlihat arsitektur kolonial yang terletak di wilayah utara Kota Surabaya yang mana pada daerah tersebut juga terdapat pelabuhan sebagai akses keluar masuk ke Kota Surabaya.

Asitektur kolonial sendiri merupakan arsitektur yang dibawa Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan. Bentuk, karakteristik, dan ciri arsitektur kolonial dilatarbelakangi oleh perpaduan budaya antara budaya khas Eropa (Belanda) dan budaya nusantara. Faktor utama yang berpengaruh terhadap ciri khas dari arsitektur kolonial ini yaitu perpaduan antara gaya arsitektur Eropa dengan iklim tropis yang ada di Indonesia. Arsitektur kolonial di Indonesia terbagi ke dalam tiga periode yaitu; Indische Empire (abad 18-19), Arsitektur Transisi (1890-1915), dan arsitektur kolonial modern (1915-1940). Dalam batasan penelitian ini, arsitektur Indische Empire tidak termasuk ke dalam periode abad XX sehingga berikut ini akan dipaparkan mengenai dua arsitektur kolonial yaitu arsitektur kolonial transisi dan arsitektur kolonial modern

1. Gaya Arsitektur Transisi (1890-1915)

Perkembangan arsitektur kolonial transisi di Indonesia ini tidak bertahan lama yaitu hanya pada penghujung abad 19 (tahun 1890) hingga awal abad 20 (tahun 1915). Karakteristik arsitektur transisi yang dapat dijumpai yaitu konstruksi atap berbentuk pelana dan perisai, material atapnya menggunakan genting, terdapat ventilasi di bagian atap (*dormer*), bentuk atapnya tinggi dengan kemiringan berkisar antara 45 derajat sampai 60 derajat, kolom order yunani perlahan-lahan tidak digunakan lagi, diganti dengan kolom kayu dan beton serta digunakan sebagai elemen dekorasi, konstruksi dinding pemikul dijadikan sebagai konstruksi utama dengan menggunakan bahan material bata dan kayu. Pada

⁷ Tim Penyusun Buku Hari Jadi Kota Surabaya, *Hari Jadi Kota Surabaya, 682 Tahun Sura Ing Baya* (Surabaya: Pemerintah Kotamadya Tingkat II Surabaya, 1975), hlm. 123.

gaya ini tidak terlalu banyak menggunakan material kaca pada jendela.

Salah satu bangunan dengan arsitektur kolonial transisi ini yaitu gedung Balai Pemuda yang dulunya bernama *The Simpangsche Societeit* (Simpang Club) yang dibangun oleh arsitek Belanda bernama Westmaas pada tahun 1907.

2. Gaya Arsitektur Kolonial Modern (1915-1940)

Arsitektur kolonial modern menjadi sebuah bentuk pemberontakan yang dilampiasikan oleh arsitek Belanda setelah tahun 1900 terhadap gaya Empire. Karakteristik visual arsitektur kolonial modern (1915-1940) di antaranya ialah penggunaan atap datar dari bahan beton, pemakaian gevel horizontal, mulai menggunakan besi cor, bahan kaca (terutama pada jendela) mulai digunakan dalam jumlah besar dan lebar, bangunan didominasi dengan warna putih.⁸

Arsitektur Kolonial Modern diterapkan di Surabaya oleh arsitek bernama G. C. Citroen yang juga banyak mengemukakan gagasan mengenai keinginannya dalam menciptakan arsitektur yang berbeda dari arsitektur Eropa, yaitu dengan menggabungkan arsitektur kolonial dengan adaptasi iklim lokal, orientasi bangunan mengarah ke Utara Selatan, *façade gallery* yang mengelilingi bangunan, penggunaan gevel ganda untuk membantu proses ventilasi silang serta terdapat banyak *spot* terbuka pada bangunan. Hal tersebut terlihat pada salah satu hasil karyanya yaitu gedung Balai Kota Surabaya yang didirikan pada tahun 1915-1925.

Handinoto dalam buku *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940* menjelaskan mengenai elemen arsitektur kolonial sebagai berikut :

- 1) *Gable* (gevel), terletak pada fasad bangunan, bentuknya segitiga mengikuti pola atap.
- 2) *Tower* (Menara), memiliki bentuk yang bervariasi, seperti lingkaran, segi empat, segi enam, hingga bentuk-bentuk geometris lain.
- 3) *Dormer* (Cerobong asap semu), memiliki kegunaan sebagai sirkulasi udara dan tempat masuknya cahaya. Di Belanda, dormer memiliki bentuk yang cukup tinggi dan berfungsi sebagai tempat cerobong asap untuk perapian.
- 4) *Tympanon*, sebuah ornamen hiasan berbentuk segitiga atau setengah lingkaran dan biasanya terletak di bagian atas pintu maupun jendela.
- 5) *Ballustrade*, merupakan pagar yang umumnya dibuat dari beton cor yang berfungsi sebagai pagar pembatas balkon, atau dek bangunan.

- 6) *Bouvenlicht* (Lubang ventilasi), *bouvenlicht* terletak di fasad bangunan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan termal.
- 7) *Windwijzer* (Penunjuk arah angin), merupakan ornamen yang diletakkan di atas nok atap sebagai penunjuk arah angin.
- 8) *Nok Acroterie* (Hiasan puncak atap), ornamen ini terletak di bagian puncak atap dan berfungsi sebagai hiasan bangunan
- 9) *Geveltoppen* (Hiasan puncak atap depan), hiasan ini biasanya terletak di puncak gevel dan disebut juga dengan “mahkota”.
- 10) *Voorschot*, elemen dekoratif dengan bentuk segitiga yang diletakkan di bagian depan rumah.

F. Perkembangan Arsitektur Jengki di Surabaya pada Tahun 1950-1960

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait arsitektur. Yang pertama, jumlah arsitek Belanda di Indonesia berkurang dan tidak banyak arsitek Indonesia yang dapat menggantikan mereka. Kedua, kurangnya material bangunan sehingga meminimalkan produksi bangunan. Ketiga, mantan pegawai Departemen Pekerjaan Umum Belanda diminta untuk mengambil alih tugas arsitek Belanda. Keempat, perusahaan konstruksi ditugaskan oleh klien untuk bertindak sebagai arsitek, lulusan universitas teknik sipil juga ditugaskan untuk melakukan pekerjaan arsitektur karena kurangnya tenaga arsitek di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan lahirnya arsitek-arsitek yang sangat konservatif pada tahun-tahun tersebut dan juga mulai muncul gerakan yang ingin membuktikan bahwa Bangsa Indonesia juga bisa membangun negeri seperti yang dilakukan orang-orang Eropa.⁹ Gerakan tersebut termanifestasi pada munculnya arsitektur asli Indonesia yang telah disesuaikan dengan iklim tropis dan mulai berkembang sekitar tahun 1950-an.

Arsitektur asli Indonesia tersebut biasa disebut masyarakat dengan sebutan “gaya jengki”. Johan Silas mengatakan bahwa arsitektur yang khas ini merupakan bentuk ekspresi semangat politik dan simbol kebebasan di kalangan masyarakat Indonesia.¹⁰ Disebut demikian karena semangat kebebasan itu dituangkan ke dalam arsitektur baru dan berbeda dengan apa yang telah dibangun oleh Belanda. Gaya bangunan Belanda yang sarat akan bentuk kubik dan geometris modern kaku, diubah menjadi bentuk yang lebih rumit seperti segi lima dan bentuk-bentuk tidak beraturan lainnya. Tidak ada aturan khusus dalam pembangunan arsitektur jengki, namun masih sesuai dengan iklim dan fungsi

⁸ Handinoto, ‘Arsitek G.C. Citroen dan Perkembangan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya (1915-1940)’, *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)*, vol. 19 (1993), hlm 1-16.

⁹ Josef Prijotomo, “When East Meets West: One Century of Architecture in Indonesia (1890s-1990s),” *Architronic* 5, no. 3 (1996): 1–10, hlm. 5.

¹⁰ ‘Diskusi Pribadi Josef Prijotomo Dengan Johan Silas’, 4 Mei 1993.

bangunan. Kebanyakan bentuk atap dari bangunan jengki memiliki ciri yang sangat khas, salah satunya yaitu kedua sisi atap tidak bertemu dan tidak memiliki bubungan (wuwung). Selain itu, bangunan jengki umumnya memiliki bidang permukaan dan komposisi meriah yang mana bangunan dengan ciri-ciri tersebut sangat jarang ditemui di Eropa maupun Amerika. Di Indonesia, bentuk yang khas ini banyak dirancang oleh arsitek lokal dan juga mahasiswa arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB).¹¹

Bangunan dengan arsitektur jengki ini tersebar di seluruh Indonesia. Di Kota Surabaya sendiri bangunan arsitektur jengki berupa tempat tinggal dapat ditemui di Jalan Raya Darmo, Krembangan, Kampung Maspati, rumah Salim Martak di jalan Untung Suropati, dan juga bangunan umum yang ada di depan Taman Makam Pahlawan. Kepopuleran arsitektur jengki hanya bertahan hingga pada tahun 1960-an, karena pada tahun 1970-an mulai muncul desain arsitektur modern yang terinspirasi dari arsitek Amerika Latin yang mempunyai ciri *brise-soleil*, bergeometri teratur, dan pengulangan elemen fasad.¹²

G. Arsitektur Jengki sebagai Bentuk Penolakan terhadap Arsitektur Kolonial

Dalam perkembangan arsitektur di Indonesia dan Kota Surabaya, kemunculan arsitektur jengki berada di antara masa arsitektur kolonial dan arsitektur modern. Hadirnya arsitektur jengki ini dilandasi oleh semangat bangsa Indonesia dalam sektor pembangunan, tumbuh rasa ingin menunjukkan bahwa tanpa orang-orang Eropa pun bangsa Indonesia dapat membangun negeri dengan baik. Hal tersebut juga menjadi fokus penting yang digaungkan Soekarno pasca deklarasi kemerdekaan Indonesia seperti yang tercantum dalam pidatonya “Mari kita buktikan bahwa kita juga bisa membangun negeri ini seperti yang dilakukan oleh orang Eropa dan Amerika, karena kita setara.”¹³ Sehingga muncul arsitektur jengki yang di dalamnya tertuang semangat para arsitek dalam mencari jati diri atas gaya bangunan, karena sebelumnya dunia arsitektur di Indonesia hanya berkiblat pada bangunan kolonial khas Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi arsitektur jengki hadir sebagai bentuk penolakan ideologis para arsitek yang ingin menunjukkan bahwa mereka juga bisa menciptakan sebuah bangunan yang memiliki makna simbolis dan berbeda dengan bentuk arsitektur kolonial.

Meskipun beberapa arsitektur jengki dibangun oleh arsitek lokal yang dulunya menjadi asisten arsitek Belanda, arsitektur jengki ini sama sekali berbeda dengan arsitektur masa kolonial yang dibangun oleh Belanda. Jika ditelaah lebih dalam dengan melakukan

komparasi antara kedua arsitektur ini, maka akan terlihat perbedaan yang signifikan bahwa masing-masing arsitektur memiliki ciri, karakteristik, makna historis, dan dipengaruhi oleh budaya yang berbeda. Pada mulanya arsitektur kolonial dibangun untuk menjadi tempat tinggal orang Belanda yang menetap di Indonesia, sehingga arsitek Belanda merancang bangunan bergaya klasik yang mirip dengan yang ada di Belanda namun telah disesuaikan dengan iklim tropis di Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar orang-orang Belanda merasa nyaman dan bisa beradaptasi dengan iklim lokal.¹⁴

Penyesuaian desain bangunan dengan iklim tropis ini diperhitungkan dengan baik oleh para arsitek Belanda. Seperti di Malang contohnya, desain bangunan klasik khas Eropa dirancang dengan menyesuaikan terik matahari dan curah hujan yang tinggi sehingga pada bangunannya terdapat ventilasi udara yang baik. Sama halnya dengan bangunan di Kota Surabaya, bangunan yang dibangun juga terinspirasi dari gaya arsitektur yang populer di Eropa pada abad ke-19 namun telah disesuaikan dengan iklim, bahan, dan teknologi lokal. Sehingga hasilnya yaitu lahir sebuah desain bangunan kolonial modern yang berbeda dengan gaya bangunan barat. Contoh lain yaitu arsitektur gedung Balai Kota Surabaya yang dirancang oleh G. C. Citroen dengan menggunakan pendekatan fungsional dan estetika yang mengedepankan kenyamanan ruang terhadap iklim tropis. Balai Kota Surabaya didesain menghadap arah utara-selatan dan memiliki *façade-gallery* untuk mengurangi tampias air hujan dan menghalau masuknya sinar matahari.

Meskipun sudah melalui tahap penyesuaian dengan kondisi iklim tropis dan bahan-bahan di Indonesia, bangunan kolonial umumnya didesain megah dan masih mengadopsi unsur-unsur Eropa dan mempertahankan estetika Eropa. Hal ini terlihat dari penggunaan kolom Doric, Ionic, Corinthian yang diadopsi dari gaya klasik arsitektur Yunani Kuno. Sehingga arsitektur pada masa kolonial ini bisa juga disebut dengan arsitektur yang meng-Eropa-kan wilayah tropis dan sebagai simbol kekuasaan dan superioritas Bangsa Barat di Indonesia.

Adanya arsitektur kolonial sangat bertentangan dengan kelahiran arsitektur jengki yang mana dalam pembangunannya terkandung rasa nasionalisme, kemerdekaan, keberanian, dan kebebasan. Keberadaan arsitektur jengki sendiri bisa dikatakan sebagai representasi identitas Indonesia pasca-kolonial karena adanya keinginan untuk melepaskan diri dari pengaruh kolonialisme barat. Arsitektur jengki juga merupakan bentuk penolakan idealisme para arsitek lokal atas arsitektur kolonial yang merepresentasikan kejayaan

¹¹ Prijotomo, *op. cit.*, hlm 6.

¹² *Ibid*, hlm 6

¹³ Ir. Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Dabara Publishers, 1959).

¹⁴ Sahrura dan Wahyuningrum, ‘Identifikasi Langgam Dan Periodisasi Arsitektur Kolonial Nusantara Pada Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus: Poliklinik Bathesda, Semarang)’, 18.2 (2018), hlm. 63–72.

Hindia-Belanda di tanah jajahan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kolonialisme mulai ditinggalkan setelah kepergian Belanda dan arsitek lokal menciptakan desain bangunan dengan identitas baru yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Hal tersebut terlihat dari cara arsitek lokal mengekspresikan penolakannya terhadap pengaruh kolonialisme ke dalam arsitektur jengki. Desain bangunan jengki sangat berbeda dengan arsitektur kolonial, sehingga terdapat karakteristik yang berbeda pula antara arsitektur jengki dengan arsitektur kolonial. Tidak hanya itu, bahan material, ornamen, hingga makna simboliknya juga berbeda dan hanya ditemukan sedikit persamaan.

Sama halnya dengan arsitektur kolonial, pada arsitektur jengki bangunan didesain dengan menyesuaikan iklim tropis dengan memperhatikan cuaca panas dan curah hujan. Namun terdapat hal-hal membedakan yang dapat mengkategorikan arsitektur jengki sebagai arsitektur khas Indonesia yaitu adanya filosofi dan makna simbolik yang terkandung dalam bangunan. Kebanyakan arsitektur jengki menggunakan geometri pentagonal, dengan komposisi dinding trapesium dan persegi bergabung dengan atap pelana yang berbentuk segitiga. Bentuk pentagonal ini memiliki makna tersendiri yang merupakan adaptasi dari ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu, penggunaan bahan material dan teknik konstruksi juga berbeda dengan arsitektur kolonial sebagai bentuk pemisahan diri dari tradisi konstruksi kolonial. Bentuk-bentuk geometri bebas dan elemen-elemen asimetris pada arsitektur jengki juga merupakan cerminan kebebasan berekspresi para arsitek lokal yang mana mereka tidak lagi terikat aturan tertentu dan merdeka atas bentuk-bentuk simetris khas arsitektur kolonial.

Maka dapat ditarik garis besar bahwa perkembangan arsitektur jengki di Indonesia dipengaruhi oleh keberadaan arsitektur kolonial yang sangat banyak di Indonesia. Pada setelah kepergian Belanda muncul suatu keinginan untuk menciptakan bangunan yang mencerminkan nilai-nilai dan budaya asli bangsa Indonesia dan menghilangkan segala bentuk ciri khas kolonial Belanda. Bangunan arsitektur jengki telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, mulai dari penyesuaian desain dengan iklim tropis, bentuk geometri pentagonal yang difilosofikan sebagai Pancasila, penggunaan bahan material lokal seperti bata dan beton, serta didesain oleh arsitek lokal yang merupakan lulusan STM, yang dulunya asisten arsitek Belanda, maupun arsitek lulusan universitas luar negeri. Arsitektur jengki muncul pertama kali dalam desain rumah tinggal di daerah Kebayoran Baru, Jakarta pada tahun 1948. Kawasan Kebayoran Baru merupakan kawasan proyek perumahan yang direncanakan oleh Belanda sebelum mengangkat kaki dari Indonesia, kemudian digarap oleh arsitek lokal Moh Soesilo. Setelah kemunculannya di Jakarta, perkembangan arsitektur jengki mulai menyebar

ke daerah-daerah lain terutama di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya yaitu Kota Surabaya.

H. Analisis Tipologi Fasad Bangunan Jengki di Surabaya

Berdasarkan gagasan para ahli, tipologi merupakan suatu konsep yang digunakan untuk proses klasifikasi/pengelompokan dari berbagai tipe atau komponen arsitektural berdasarkan persamaan bentuk, struktur, dan karakteristik yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan di antara bagian-bagian penyusun objek. Sedangkan fasad menurut Bob Krier adalah komponen yang berperan penting pada sebuah bangunan karena kegunaannya sebagai bentuk ekspresi fungsi bangunan dan memberikan kesan visual bagi orang yang melihatnya.

Bangunan jengki tentunya juga memiliki elemen umum yang melekat pada bangunannya. Elemen tersebut dideskripsikan oleh Josef Prijotomo sebagai berikut:

1. Atap pelana

Kebanyakan bangunan yang bergaya jengki memiliki bentuk atap pelana (atap yang mempunyai dua bidang atap), dengan kemiringan kurang lebih 35° . Dalam variasi lain, terdapat bentuk atap yang tidak bertemu pada satu sisi yang sama sehingga membentuk bidang dinding di antara kedua atap tersebut. Biasanya, pada dinding tersebut dipasang krawang yang berfungsi sebagai lubang angin.

2. Tembok depan (gevel) berbentuk miring

Pada awal pembuatan bangunan jengki yang bercirikan anti-geometris menghasilkan bentuk segi lima dari kemiringan sisi penahan atap pelana yang membentuk segitiga (gewel). Dalam perkembangannya, bidang miring tidak hanya berada pada dinding, tetapi juga pada kolom yang mengecil ke bawah. Pada bangunan yang berbentuk segi lima, jendela dan pintu dibuat dengan bentuk yang variatif seperti trapesium tidak beraturan, lingkaran, belah ketupat, dll

3. Krawang (loster)

loster menjadi elemen penting di iklim tropis yang menjadi lubang ventilasi keluar masuknya udara dan umumnya diletakkan di bidang segi lima. Pada bangunan jengki, loster memiliki nilai estetika tersendiri karena bentuknya yang bermacam-macam seperti segi lima, segi tiga, lingkaran, hingga trapesium tidak beraturan.

4. Teras (beranda)

Keberadaan teras sebagai elemen penyeimbang dari keseluruhan komposisi bangunan. Di beberapa bangunan terdapat atap datar di bagian teras yang umumnya ditopang oleh tiang berbentuk menyerupai huruf "V".

5. Bingkai beton dan elemen pembentuk ornamen

Beberapa elemen menggunakan struktur rangka

beton. Penempatan ornamen terdapat pada dinding, dan kolom bangunan yang umumnya berbentuk pola garis linear vertikal dan horizontal serta dikombinasikan dengan pola meliuk dan motif-motif alam seperti matahari, sulur-sulur, tanaman, dll.

Pada kawasan yang menjadi fokus penelitian, diambil sebanyak tujuh bangunan yang menjadi sampel penelitian. Meliputi 1 bangunan umum dan 6 bangunan tempat tinggal. Sampel penelitian berlokasi di Alun-alun Contong, Bubutan, Ampel, Kebalen, dan Darmo yang ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 1 Sampel Penelitian

Sampel	Jenis Bangunan	Gambar	Alamat
Sampel 1	Rumah tinggal		Kebalen Wetan Gg 3 No. 5
Sampel 2	Rumah tinggal		Jl. Tambak Bayan No. 17
Sampel 3	Rumah tinggal		Kampung Maspati 3 No. 35
Sampel 4	Rumah tinggal		Kampung Maspati 3 No. 45
Sampel 5	Bangunan umum		Jl. Koblen Tengah 22-A
Sampel 6	Rumah tinggal		Jl. KH Mas Mansyur
Sampel 7	Rumah tinggal		Jl. Raya Darmo No. 126

Sumber: Data penulis 2024

Seperti yang telah dipaparkan di awal, bahwa tipologi merupakan proses mengklasifikasikan berbagai tipe atau komponen arsitektural untuk mengidentifikasi kesamaan di antara bagian-bagian penyusun objek bangunan, maka pada penelitian ini sampel bangunan jengki akan diklasifikasikan berdasarkan warna, bentuk atap, bentuk jendela, bentuk roster, dan ornamen dinding

1. Tipologi Warna

Dari ketujuh sampel yang dipilih, masing-masing bangunan menggunakan dominan warna putih di bagian dinding dan warna tambahan coklat, kuning, dan hijau

Tabel 2 sebaran tipe warna bangunan pada sampel

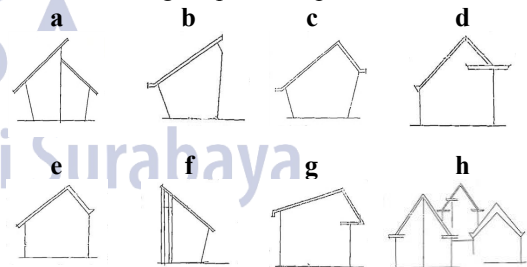
Sampel	Warna Dominan			
	Putih	Coklat	Kuning	Hijau
Sampel 1	√	√		
Sampel 2	√		√	
Sampel 3	√			
Sampel 4	√			√
Sampel 5	√	√		
Sampel 6		√	√	
Sampel 7	√		√	

Hasil tipe warna yang digunakan pada setiap tipe warna yang digunakan pada setiap sampel bangunan jengki yaitu 2 diantaranya didominasi oleh warna putih coklat (sampel 1 dan sampel 5), 2 bangunan didominasi oleh warna putih kuning (sampel 2 dan sampel 7), 1 bangunan didominasi warna putih hijau (sampel 4), 1 bangunan keseluruhan menggunakan warna putih (sampel 3), dan 1 bangunan didominasi warna coklat dan kuning (sampel 6).

2. Tipologi Atap

Atap merupakan bagian utama yang menjadi ciri khas bangunan jengki. Bagi sebagian orang dapat menentukan apakah sebuah bangunan merupakan bangunan jengki atau bukan, dapat dilihat dari bentuk atapnya. Terdapat jenis atap yang biasanya digunakan dalam bangunan jengki yaitu atap pelana dengan kemiringan 35° , namun dalam beberapa bangunan juga terdapat bentuk atap yang tidak bertemu pada setiap sisinya.

Berikut beberapa bentuk atap bangunan jengki yang telah dirumuskan oleh departemen arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember:



Gambar 1 Sketsa bentuk atap bangunan arsitektur jengki

Sumber: Dokumentasi Jurusan Arsitektur ITS

Berdasarkan sketsa di atas, menunjukkan bahwa kebanyakan bangunan tempat tinggal yang berarsitektur jengki memiliki bentuk atap pelana yang beragam. Atap pelana pada arsitektur jengki dirancang tidak terbatas dengan aturan tertentu, atau

dengan kata lain para arsitek bebas menentukan desainnya, sehingga kebanyakan bentuk atapnya memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Tabel 3 Sebaran tipe bentuk atap pada sampel

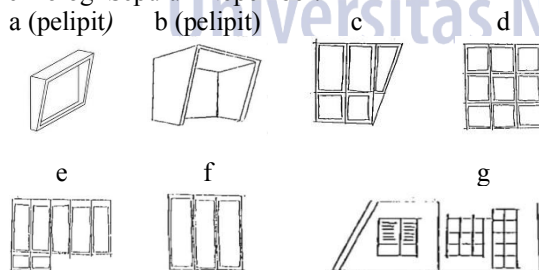
Sampel	Bentuk Atap							
	a	b	c	d	e	f	g	h
Sampel 1	√							
Sampel 2			√					√
Sampel 3								√
Sampel 4								√
Sampel 5			√					
Sampel 6								
Sampel 7	√							

Hasil dari tabel analisis bentuk atap menunjukkan bahwa yang paling dominan digunakan pada sampel bangunan jengki yang dipilih yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada ketujuh sampel yang diambil, enam di antaranya berbentuk pelana dengan berbagai jenis yang telah dimodifikasi, dua bangunan menggunakan bentuk atap pelana yang kedua sisinya tidak bertemu (sampel 1 dan sampel 7). Satu bangunan lainnya menggunakan atap datar (sampel 6).
- 2) Selain itu, pada beberapa sampel bangunan kedua sisinya bertemu namun tidak memiliki panjang sama, dan pada ujungnya terdapat teritisan.

3. Tipologi Jendela

Bentuk jendela pada bangunan jengki masih terikat pada fungsinya dan menggunakan bahan material kaca. Hal unik yang dapat dijumpai yaitu di bagian bingkai jendela yang mana pada beberapa jendela bangunan jengki dihiasi dengan bentuk pelipit yang menjorok ke luar dan terlihat miring jika tampak dari samping. Keberadaan pelipit miring yang menjorok ke luar ini disesuaikan dengan iklim tropis di Indonesia yang berfungsi untuk melindungi jendela dan meminimalkan sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan. Berikut beberapa sketsa bentuk pelipit dan jendela bangunan jengki yang telah dirumuskan oleh departemen arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember:



Gambar 2 Sketsa bentuk jendela dan pelipit bangunan arsitektur jengki

Sumber: Dokumentasi Jurusan Arsitektur ITS

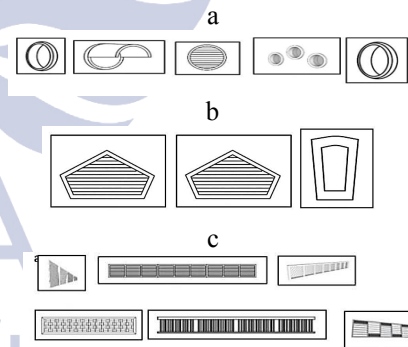
Tabel 4 Sebaran tipe jendela pada sampel

Sampel	Bentuk Jendela						
	1	2	3	4	5	6	7
Sampel 1	√			√			
Sampel 2					√		
Sampel 3		√			√		
Sampel 4					√		
Sampel 5							
Sampel 6			√			√	
Sampel 7							√

Hasil dari analisis tabel di atas menunjukkan bahwa pada beberapa sampel terdapat kesamaan bentuk jendela yaitu 2 bangunan menggunakan tipe jendela e (sampel 2 dan sampel 4). Empat dari tujuh bangunan di antaranya menggunakan pelipit pada jendela (sampel 1, sampel 3, sampel 6, sampel 7), sedangkan salah satu sampel tidak terdapat jendela di bagian fasad yaitu bangunan umum Gereja Isa Almasih Surabaya.

4. Tipologi Roster

Roster tidak dapat dipisahkan dengan bangunan jengki, karena sejatinya bangunan jengki merupakan bangunan orisinil dari bangsa Indonesia yang dibangun para arsitek lokal dengan menyesuaikan iklim tropis. Dengan adanya roster atau lubang ventilasi berbentuk lingkaran, belah ketupat, segilima, segitiga, maupun bentuk tidak beraturan menjadi elemen penting yang membentuk fasad bangunan jengki.¹⁵ Berikut beberapa bentuk roster yang umum digunakan menurut penelitian Firman Mutaqin dkk.



Gambar 3 Sketsa bentuk roster bangunan arsitektur jengki

Sumber: Firman Mutaqin dkk, 'INDEKS VISUAL FURNITUR DAN ARSITEKTUR JENGI BERBASIS DATA PRESEDEN ARSITEKTUR (Visual Index of Jengki Architecture and Furniture Based on Architectural Precedent Data), *Tesa Arsitektur*, 20.1 (2022), hlm. 8.

¹⁵ Kurniawan, Kemas Ridwan, 'Identifikasi Tipologi Dan Bentuk Arsitektur Jengki Di Indonesia Melalui Kajian Sejarah' (Universitas Indonesia, 1999)

- a. Pada bangunan jengki banyak ditemui roster yang berbentuk lingkaran
- b. Roster berbentuk pentagonal atau segilima
- c. Roster berbentuk grid atau susunan papan kayu yang disusun berjajar

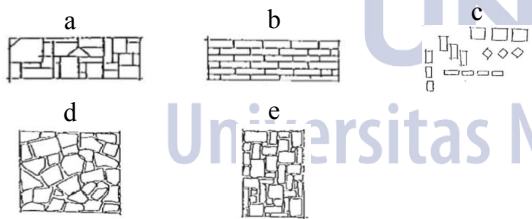
Tabel 5 Sebaran tipe roster pada sampel

Sampel	Bentuk Roster			
	Lingkaran	Penta gonal	Grid	Persegi
Sampel 1	√			
Sampel 2	√		√	
Sampel 3	√			
Sampel 4		√		
Sampel 5		√		
Sampel 6				√
Sampel 7				√

Hasil dari analisis tabel di atas yaitu terdapat 2 sampel bangunan jengki yang menggunakan roster lingkaran (sampel 1 dan sampel 3), 2 sampel menggunakan roster berbentuk pentagonal (sampel 4 dan sampel 5), 1 sampel menggunakan bentuk roster lingkaran dan grid (sampel 2), dan 2 sampel menggunakan bentuk roster persegi (sampel 6 dan 7)

5. Tipologi Dinding

Pada tipologi dinding ini yang ditinjau adalah dari segi penggunaan material dan ornamen yang menempel pada dinding bangunan. pada bangunan jengki umumnya bahan baku yang digunakan pada fasad yaitu batu, dinding ukir, besi, dan papan kayu. Kebanyakan dinding pada bangunan jengki memiliki tekstur yang kasar karena berupa adukan semen yang hanya ditempel ke dinding tanpa proses *finishing*. Selain itu, bentuk kasar pada dinding juga didapat dari adanya hiasan batu alam yang menempel pada bagian dinding bangunan. berikut beberapa komposisi pada dinding bangunan jengki yang telah dirumuskan oleh departemen arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember:



Gambar 4 Sketsa bentuk dinding dan ornamen bangunan arsitektur jengki

Sumber: Dokumentasi Jurusan Arsitektur ITS

- a. Dinding dengan tekstur batu bata kasar yang tidak melalui proses finishing dan bentuknya tidak beraturan
- b. Dinding dengan tekstur batu bata kasar yang masih menonjolkan bentuk material aslinya namun bentuknya masih beraturan

- c. Dinding dengan hiasan ornamen berbentuk segi empat, persegi panjang, dan belah ketupat
- d. Dinding dengan hiasan ornamen batu alam yang tidak simetris dan disusun secara acak/tidak beraturan
- e. Dinding dengan hiasan ornamen batu alam berbentuk segiempat yang disusun secara acak namun masih berbentuk simetris

Tabel 6 Sebaran bentuk dinding dan ornamen pada sampel

Sampel	Bentuk Ornamen Dinding				
	1	2	3	4	5
Sampel 1		√			
Sampel 2					√
Sampel 3			√		
Sampel 4			√		
Sampel 5		√			
Sampel 6					√
Sampel 7				√	

Hasil dari analisis tabel di atas yaitu terdapat 2 bangunan yang dindingnya menggunakan batu alam yang tersusun simetris seperti gambar tipe b (sampel 1 dan sampel 5), lalu terdapat 2 sampel yang mana pada dindingnya terdapat bentuk persegi yang saling berhubungan seperti salah satu tipe c. Kemudian 2 bangunan lainnya menggunakan ornamen dinding seperti pada tipe e (sampel 2 dan sampel 6) yang berbentuk batu alam segiempat yang disusun secara acak namun masih berbentuk simetris, dan 1 bangunan menggunakan hiasan ornamen batu alam yang tidak simetris dan disusun secara acak/tidak beraturan pada dindingnya seperti sketsa tipe d (sampel 7).

PENUTUP

Kesimpulan

Pada rentang tahun 1950-1960 Indonesia masih berada di masa transisi pasca proklamasi kemerdekaan sehingga kondisi sosial politik masih belum stabil. Ketidakstabilan kondisi sosial politik nasional ini sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di daerah. Di Kota Surabaya, pemerintah kota dihadapkan pada persoalan sosial yang ditimbulkan dari derasnya arus urbanisasi yang mengakibatkan timbulnya stigma antar golongan penduduk dari etnis tertentu, hingga ketimpangan antara banyaknya jumlah penduduk dengan ketersediaan tempat tinggal. Hal tersebut berakibat pada munculnya pemukiman-pemukiman liar di Kota Surabaya. Selain kondisi sosial, ketidakstabilan politik juga dirasakan masyarakat Kota Surabaya karena pada saat itu masih dalam tahap pencarian sistem pemerintahan yang cocok diterapkan di Indonesia.

Proses pembangunan di Kota Surabaya sejalan dengan berkembangnya arsitektur di kota ini. Bentuk dan ciri arsitektur bangunan yang ada pada tempat dan masa tertentu merupakan pengaruh dari adanya fenomena sosial,

ekonomi, politik, keagamaan, dan iklim di lingkungan tersebut. Sehingga arsitektur jengki yang mulai berkembang di tahun 1950-an turut hadir mewarnai jejak perkembangan arsitektur di Kota Surabaya sebagai pengaruh fenomena sosial yang terjadi pada saat itu yaitu bentuk perlawanan dan kebebasan para arsitek dari kolonialisme. Pasca kemerdekaan dan kepergian Belanda, arsitek-arsitek lokal dengan semangat nasionalisme mulai mencari jati diri mereka sendiri dengan membuat bangunan yang sangat berbeda dengan bangunan kolonial (*Indische Empire*) dan juga menggunakan teknik konstruksi yang berbeda dengan yang telah diajarkan para arsitek Belanda. Mereka membuang ciri khas kolonial pada bangunan dan menghadirkan bangunan yang tidak terikat aturan (bangunan bergeometri bebas, atap berbentuk pelana yang dimodifikasi) namun telah disesuaikan dengan fungsi dan kondisi iklim di Indonesia.

Tipologi bangunan jengki pada sampel bangunan jengki di Surabaya yang digunakan cenderung memiliki banyak karakteristik fasad yang sama. Terdapat kesamaan pada warna bangunan jengki yang didominasi warna putih dan kuning/cokelat, terdapat kesamaan pada keseluruhan atap bangunan yang menggunakan jenis atap pelana dengan beberapa modifikasi. Selain itu juga terdapat kesamaan pada bentuk jendela dan penggunaan roster pada bangunan, serta kesamaan pada dinding bangunan jengki yang memiliki tekstur kasar atau masih berbentuk batu bata alami karena tidak melalui proses finishing serta adanya ornamen batu alam pada dindingnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Surat Kabar

'Penduduk terus Mengalir ke Kota Surabaya', *Trompet Masyarakat*, 1 April 1953.

B. Buku

Basundoro, Purnawan, *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi (1906-2012)* (Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan Elmantara Publishing, 2012)

Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940*. (Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen PETRA Surabaya, 1996)

Ir. Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi* (Dabara Publishers, 1959)

Jan Luiten van Zanden Daan Marks, *Ekonomi Indonesia 1800-2010 Antara Drama Dan Kejayaan Pertumbuhan* (PT Gramedia, 2012)

Krier, Rob, *Komposisi Arsitektur* (Erlangga, 2001)

Muhaimin, Yahya A., *Bisnis Dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980* (LP3ES, 1990)

Nasution, *Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial 1830-1930* (Pustaka Intelektual, 2006)

Rintoko, Rafiandeta, and Exocet, *Seri Sejarah Soerabaja: Studi Dokumentasi Perkembangan Teritorial Surabaya, 1850-1960* (Unesa University Press, 2010)

Tim Penyusun Buku Hari Jadi Kota Surabaya, *Hari Jadi Kota Surabaya, 682 Tahun Sura Ing Baya* (Pemerintah Kotamadya Tingkat II Surabaya, 1975)

C. Artikel Ilmiah

Handinoto, 'Arsitek G.C. Citroen dan Perkembangan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya (1915-1940)', *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)*, vol. 19 (1993), pp. 1-16.

Kurniawan, Kemas Ridwan, 'Identifikasi Tipologi Dan Bentuk Arsitektur Jengki Di Indonesia Melalui Kajian Sejarah' (Universitas Indonesia, 1999)

Prijotomo, Josef, 'When East Meets West: One Century of Architecture in Indonesia (1890s-1990s)', *Architronic*, 5.3 (1996), pp. 1-10
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.39.1000&rep=rep1&type=pdf>

R. Heida, 'De Kampongverbetering Te Soerabaja,' dalam *Locale Techniek No.2* (Soerabaja-Nummer), Maart-April, 1939, hlm. 49.

Sahmura, Yemima, and Sri Hartuti Wahyuningrum, 'Identifikasi Laggam Dan Periodisasi Arsitektur Kolonial Nusantara Pada Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus: Poliklinik Bathesda, Semarang)', *Modul*, 18.2 (2018), pp. 63-72